

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk menuju cita-cita negara, sebagaimana pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI. Para pendiri bangsa telah banyak berdebat menyoal sistem apa yang akan kita pilih untuk menapaki alam merdeka pasca kolonialisme dan imperialisme. Adalah Bung Hatta yang dengan konsisten menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia haruslah diisi dengan sistem demokrasi. Bagi Hatta, demokrasi adalah sistem yang mengandaikan bahwa semua rakyat setara: tak ada distingsi antara orang kaya dan orang miskin, antara yang pintar dan yang bodoh, maupun antara penguasa dan rakyat jelata. Demokrasi di sini bukan semata-mata hanya sistem politik belaka, melainkan juga dalam ekonomi, yang oleh Hatta disebut dengan “Demokrasi Ekonomi” (Hatta 2008). Jelasnya, demokrasi dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gema kesetaraan dalam gagasan Hatta adalah titik pangkal guna terwujudnya konsep kebangsaan Indonesia. Mengenai konsepsi bangsa, Hatta berkata: “Bangsa Indonesia yang merdeka haruslah didasar pada kesamaan rasa pernah menderita. Perasaan itu menguatkan ikatan. Karena jika tanpa yang lain, maka ikatan itu lemah. Dengan itulah kita merdeka, dan dalam kemerdekaan ada kesamaan derajat semua manusia Indonesia” (Hatta 2008). Kita dapat melihat bagaimana gagasan Hatta membuahkan pasal 1 ayat (2) dalam konstitusi, “kedaulatan adalah di tangan rakyat...”. Ia menambahkan, bahwa demokrasi adalah pergeseran kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat, dimana rakyat memegang pemerintahan secara *kolektivitet* (Hatta 2008).

Gagasan Hatta yang diucapkan 79 tahun lalu itu kini telah “jauh panggang dari api”. Banyak pemikir Indonesia kontemporer, seperti Goenawan Mohamad (GM),

yang memandang bahwa kondisi Indonesia hari ini telah jauh dari nilai-nilai demokrasi yang telah dirumuskan Hatta. Bagi Goenawan, kini tak ada lagi kesetaraan, yang diandaikan Hatta, dalam pembentukan bangsa Indonesia merdeka (Mohamad 2021). Cita-cita reformasi 1998 telah dilupakan begitu saja. Kesetaraan dalam mengakses kekuasaan telah menjadi barang mahal, karena surplus kekuasaan hanya bisa didekati oleh mereka yang sebelumnya telah berkuasa. Singkatnya, kekuasaan kini tak didapat dari kontestasi yang bebas dan setara, melainkan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam satu keluarga. Selain itu, para politisi yang terpilih untuk menduduki parlemen juga telah menjauh dari aspirasi rakyat yang memilihnya, bahkan semakin dekat dengan oligarki saja. Berbagai undang-undang dibuat bukan untuk kepentingan umum masyarakat, tetapi hanya untuk melindungi golongannya saja.

Pola seperti itu ternyata telah mulai terjadi setelah 10 tahun reformasi. Goenawan Mohamad beserta rekan-rekannya yang lain mencoba untuk memikirkan lagi reformasi yang telah diperjuangkannya dulu. Renungannya itu pun dituangkan dalam tulisan yang berjudul “Demokrasi dan Disilusi” serta “Demokrasi, Politik, dan Kairos”. Tulisan itu ia sampaikan dalam sebuah orasi ilmiah di Universitas Paramadina dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture II pada 23 Oktober 2008. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Paramadina menyusun teks orasi Goenawan itu dalam sebuah buku yang berjudul “Demokrasi dan Kekecewaan”. “Demokrasi dan Kekecewaan” adalah perubahan dari judul semula “Demokrasi dan Disilusi” serta “Demokrasi, Politik, dan Kairos”, karena judul baru dirasa lebih cocok dengan suasana politik pada waktu itu dan mewakili keseluruhan tulisan, kemudian Goenawan Mohamad pun menyetujuinya (Barito 2013). Dalam buku tersebut, dimuat pula beberapa tulisan yang menanggapi teks orasi itu. Mereka yang menanggapi antara lain: William Liddle, Rocky Gerung, Rizal Panggabean, Robertus Robert, Dodi Ambardi, dan Ihsan Ali-Fauzi.

Diskusi yang rutin dilakukan oleh PUSAD Paramadina adalah upaya untuk menghadirkan pemikiran-pemikiran segar dari tokoh yang pernah bergumul dengan Nurcholish Madjid. Pada waktu itu, seperti yang dituturkan oleh Goenawan dalam

orasi ilmiahnya, kondisi demokrasi Indonesia tengah berada pada taraf yang mencemaskan. Tentunya itu tak terlepas dari momen politik pilkada 2008 dan pemilu 2009. Dimana pada waktu itu, berdasar penuturan Goenawan, partai politik telah kehilangan marwahnya sebagai penyambung lidah rakyat. Mestinya, politisi yang menjadi legislator maupun di lembaga eksekutif haruslah mampu dengan sungguh-sungguh berbuat sesuai kehendak hati rakyat, bukan hanya pesanan dari oligarki saja (Paramadina 2014). Oleh karena itu, Goenawan lebih senang menyebut partai-partai itu sebagai partai dagang, bukan partai politik. Karena, politik uang pada saat itu begitu masif. Sehingga ada kesan bahwa suara rakyat telah dibeli oleh para politisi (*vote buying*). Anggapan Goenawan itu tentunya bukan hanya persepsi subjektifnya belaka, melainkan juga adalah kondisi objektif yang dicatat oleh lembaga internasional, seperti *Economist Intelligence Unit (EIU)*, yang datanya, khususnya dari 2007 hingga 2023, bisa kita lihat pada diagram berikut ini:



Gambar 2.1 Indeks Demokrasi Indonesia dari 2008-2023

Dari data yang tersaji pada diagram di atas, kita dapat melihat bagaimana skor indeks demokrasi kita berada pada status *flawed democracy* atau demokrasi yang cacat pada setiap rentang tahun, karena negara yang demokrasi sempurna memiliki indeks 8 ke atas (Nababan 2024). Kondisi objektif yang diperoleh dari hasil

pengamatan pihak luar tentunya tak bisa diabaikan oleh para pegiat demokrasi, khususnya yang ada di lingkaran pemikiran yang dekat dengan Nurcholish Madjid di Universitas Paramadina.

Dalam orasi ilmiahnya, meskipun tak tercatat di makalah yang ia buat, Goenawan Mohamad menuturkan bagaimana kondisi yang ia alami pada saat itu persis ketika ia bersama Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid mengkritisi rezim Soeharto yang telah menentukan Golkar sebagai pemenang pileg dan dirinya sebagai presiden meskipun pencoblosan belum dimulai. Lalu Goenawan pun bertanya kepada Nurcholish: “dari mana kita akan mengadakan perbaikan?”, dijawab oleh Nurcholish: “dari mana saja”. Di situ, Goenawan merasa bahwa demokrasi tak hendak menuntun kita pada perbaikan atau semacam perubahan yang radikal, “karena ia (demokrasi) bisa kita perbaiki dengan gerak tanpa didasari pengetahuan absolut”, ujar Goenawan (Paramadina 2014). Mungkin Goenawan benar, bahwa demokrasi adalah tindakan. Ia diperbaiki terus menerus oleh pengalaman sebuah bangsa.

Dari orasi ilmiah itu, penulis bisa merasakan bagaimana gema pesimisme yang begitu kuat dari Goenawan Mohamad terhadap praktek demokrasi yang ada. Demokrasi yang tak memiliki dasar pengetahuan yang radikal adalah demokrasi yang rapuh. Di sini, Goenawan mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan semata-mata hanya pemilu 5 tahunan belaka. Demokrasi tak bisa dibekukan dalam institusi-institusi yang telah disediakan negara. Perjuangan empiris itu mestilah didasarkan pada landasan teoritis yang kuat. Bahkan, ia cenderung tak percaya pada partai politik untuk pemilu 2009. Padahal, ia sendiri adalah anggota PAN (Partai Amanat Nasional), sekaligus pendiri PAN pada 1998 bersama Amin Rais. Ia dengan blablabla akan berjuang untuk melawan partai. Tentunya, sikap itu ia sampaikan karena begitu kecewa dengan semua partai, termasuk partainya sendiri, yang menggadaikan idealismenya hanya demi kepentingan pragmatisme pendek yang hipokrit (Paramadina 2014).

Oleh karenanya, Goenawan begitu antusias terhadap terbitnya buku *Kembali politik pemikiran politik kontemporer dari Arendt sampai Žižek* yang ditulis oleh

Rocky Gerung, Ronny Agustinus, Robertus Robert, Bagus Takwin, Daniel Hutagalung, dan Eddie Sius Riyadi. Para penulis adalah peneliti dari Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D). Diterbitkan pada bulan juli 2008, tiga bulan sebelum Goenawan menyampaikan orasi dan makalahnya di PUSAD (Pusat Studi Agama dan Demokrasi) Universitas Paramadina. Setelah membaca itu, Goenawan merasa memiliki semangat tambahan untuk berjuang bersama kekuatan masyarakat sipil (Paramadina 2014). Secara garis besar, akan penulis sampaikan beberapa pemikiran yang termuat dalam buku *Kembalinya politik pemikiran politik kontemporer dari Arendt sampai Žižek* (2008) yang diapresiasi oleh Goenawan Mohamad itu.

Perbincangan mengenai buku itu di kalangan intelektual begitu masif pada 2008-2009 silam, bahkan juga beberapa tahun setelahnya. Di tengah pendegradasian demokrasi menjadi hanya sekedar proses 5 tahunan belaka, juga “pembunuhan” politik yang dikarenakan percakapan politik hanya sekedar membicarakan kekuasaan dan uang, buku ini menjadi vitamin yang mengimpuls nalar dan juga gerakan politik di luar institusi-institusi demokrasi yang ada pada saat itu.

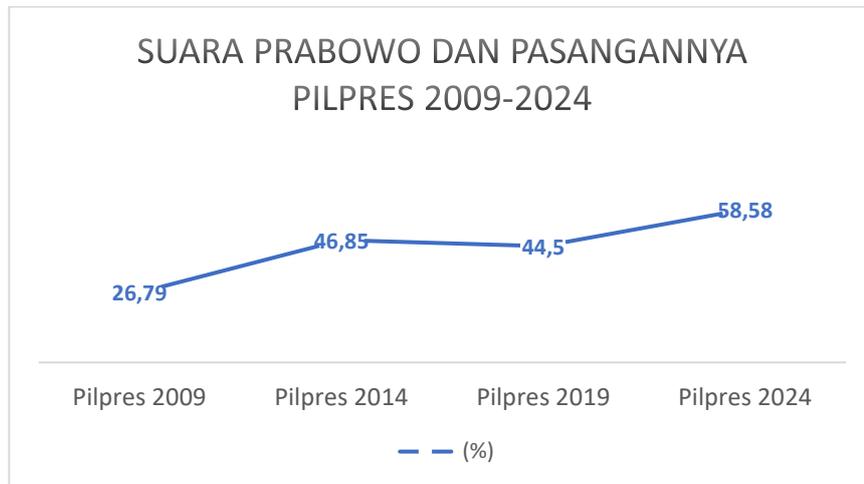
Gagasan Goenawan Mohamad dalam “Demokrasi dan Kekecewaan” selalu relevan dalam setiap pemilu, begitupun dalam pemilu 2014. Meskipun pada diagram di atas, indeks demokrasi Indonesia memiliki skor yang tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, bisa dikatakan Indonesia berada dalam tahap yang demokratis.

Kekecewaan GM ini tentunya berdasar dan sesuai fakta. Kita bisa mengetahui rentetan fakta bahwa Jokowi mencoba untuk mengendalikan pemilu ini dari laporan yang dimuat Tempo. Sebagai sebuah awalan, kita bisa membaca majalah Tempo edisi 4 Juni 2023. Dalam laporan dimuat bagaimana Jokowi berhasrat untuk melakukan cawe-cawe. Dan itu bukan hanya angin lalu, melainkan Jokowi sudah mulai merancang skenario bahwa semua capres-cawapres haruslah orang dekat Jokowi. Jika ada calon yang ingin berbeda dengan Jokowi, maka serangkaian kasus di KPK siap menjeratnya. Itu bisa dilihat bagaimana Anies mulai sering dipanggil KPK soal Formula E, kemudian para politisi Nasdem juga banyak yang dijerat kasus korupsi, begitupun bisnis Surya Paloh di Freeport yang mengalami kerugian

besar, bahkan ada politisi PKS yang dilaporkan ke polisi karena kasus pelecehan seksual (Tempo 2023).

Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi ke belakang, tepatnya pada majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, Jokowi berniat untuk memperpanjang periode jabatannya menjadi 3 periode, atau menunda pemilu hingga 2027 (Dongoran 2022). Karena rencana untuk tiga priode maupun penundaan pemilu itu ditolak oleh masyarakat luas, Jokowi pun akhirnya mengubur mimpi itu. Tapi Jokowi memiliki cara lain, ternyata hasratnya itu tak benar-benar dikubur utuh. Jokowi pun memiliki jalan lain, yakni dengan mengikutsertakan Gibran dalam Pilpres. Karena di internal PDIP Gibran tidak diwacanakan untuk maju dalam pilpres mendampingi Ganjar, mengingat usianya yang masih 36, dan mereka pesimis gugatan di MK mengenai batas usia capres-cawapres akan dikabulkan. Maka jokowi pun berniat untuk memasang Gibran dengan Prabowo Subianto (Rikang 2023). Dan ternyata benar, usaha ini berhasil. Ketua MK, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran mengabulkan gugatan itu. Gibran pun berhasil melenggang mulus menjadi cawapres. Intervensi Jokowi tidak hanya kepada lembaga negara seperti MK saja. Jokowi juga melakukan intervensi kepada Ketua Umum Partai Politik untuk mendukung Gibran menjadi cawapres. Jika nanti partai itu tidak mendukung Gibran, maka Jokowi akan membuka aib-aib parpol, mengingat Jokowi memiliki data intelejen dari setiap partai politik. Pada akhirnya, partai politik pun tersandera (Tempo 2023).

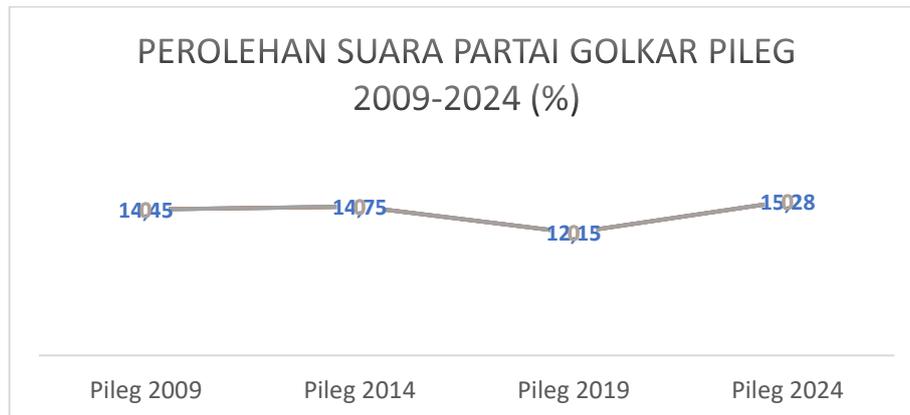
Pada akhirnya, berkat dukungan dari Jokowi sebagai presiden ini membuat Prabowo memenangkan pemilu dengan angka yang tinggi. Padahal, selama 3 kali sebelumnya mengikuti pilpres, ia selalu kalah. Berikut akan penulis tampilkan presentase suara Prabowo dari pilpres 2009-2024.



Gambar 1.3 Perolehan suara Prabowo dari Pilpres 2009 hingga 2024 (diperoleh dari situs kpu.go.id)

Dari angka tersebut dapat kita lihat bahwa suara Prabowo mengalami peningkatan yang sangat drastis. Peningkatan itu adalah implikasi dari cawe-cawe Jokowi dalam pilpres 2024 kemarin. Pada Pilpres 2024 ini, seperti yang disampaikan Prabowo sendiri, ia adalah bagian dari “Tim Jokowi”. Majalah Tempo menyebut bahwa usaha itu adalah perwujudan dari Jokowi 3 periode yang gagal terjadi (Tempo 2023).

Selain soal pilpres, pileg pun juga mengandung polemik. Laporan Majalah Tempo menyebut bahwa ada operasi dari lingkaran istana untuk meningkatkan perolehan suara Partai Golkar . Operasi itu dipimpin langsung oleh Airlangga Hartarto. Airlangga berhasil mengorkestrasi sumber daya negara untuk kemenangan partai Golkar. Hal itu makin membuat Golkar kuat, apalagi dengan struktur partai yang mengakar hingga ranting. Berikut penulis sajikan perolehan suara Golkar dari pileg 2009 hingga 2024.



Gambar 1.3 Perolehan suara Partai Golkar dari Pileg 2009 hingga 2024 (diperoleh dari situs KPU.go.id)

Kita tahu bahwa perolehan suara Golkar begitu naik signifikan. Hal ini pun membuat elite Gerindra begitu “cemburu”, karena yang mestinya mendapat efek ekor jas dari kemenangan Prabowo adalah Gerindra. Setelah didiskusikan di internal, ternyata suara Gerindra tergerus oleh Golkar. Tentu ini membuat mereka berang, karena Golkar telah mempersiapkan ini semua dari beberapa tahun sebelum pileg dilakukan. Kenaikan suara Golkar tak terlepas dari beberapa jabatan BUMN yang perusahaan tambang swasta yang dimiliki politisi Golkar. Elite Gerindra semakin dibuat berang setelah Golkar meminta banyak kursi menteri di Kabinet Prabowo. Selain itu, elite Gerindra melihat ada peran Jokowi dalam peningkatan suara Golkar pada pileg 2024. Hal ini tak terlepas dari desas-desus Jokowi ingin menguasai Golkar, baik itu sebagai Ketua Umum maupun Ketua Dewan Pembina (Tempo 2023).

Dalam hal pemilu 2024, relevansi tulisan Goenawan “Demokrasi dan Kekecewaan” adalah ketika instrumen demokrasi seperti partai politik dan penegak hukum ditumpulkan oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat dan katanya mendapat kepercayaan lebih dari 80% menurut beberapa lembaga survei. Pada akhirnya, suara-suara yang tidak suka pada Jokowi mendapat kebuntuan karena ia tidak bisa memberikan perlawanan secara maksimal mengingat kasus hukum yang akan menyimpannya, seperti yang menimpa Haris Azhar, dan kuasa uang untuk

meredam gerakannya, seperti yang penulis kerap temui di kalangan mahasiswa di kota Bandung dan Garut.

Kekuasaan pemerintah dan uang yang dimilikinya telah berhasil melumpuhkan gerakan emansipasi politik yang dilakukan warga negara. Padahal ruang publik, dimana kita bisa dengan leluasa mengkritik pemerintah, haruslah tetap ada dalam ruang demokrasi. Dan ruang publik yang bebas dan setara adalah arena kita untuk melawan kekuasaan dan uang tadi (Sius 2008). Sikap pemerintah yang cenderung ingin agar kondisi politik adem ayem telah membuat kita bersikap permisif. Sebenarnya di dalam keinginan itu tersimpan otoritarianisme. Pemerintah cenderung ingin agar demokrasi Indonesia penuh kerukunan. Tapi itu berarti mereka memahami demokrasi sebagai konsensus. Suara-suara yang berbeda dianggap sebagai “yang salah” dan harus dihilangkan. Oleh pemerintah, mereka adalah pengganggu tatanan yang telah tersusun rapi. Kondisi demokrasi yang mestinya mewacanakan kesetaraan, kini malah hanya terpusat pada elite saja. Elite menentukan semuanya. Dan kita hanya menonton saja. Ini berarti ada ketidaksetaraan antara elite parpol dengan masyarakat. Pada tesis utama dari demokrasi, sebagaimana kata Hatta di atas, adalah kedaulatan rakyat. Harus ada kesetaraan antara rakyat biasa dengan partai politik. Di sinilah emansipasi diperlukan.

Di sini penulis akan menggunakan teori Jacques Rancière dalam melihat bahwa bahwa dalam konteks Indonesia kekinian, emansipasi politik adalah hal yang diperlukan. Emansipasi adalah upaya pembebasan diri dari ketertindasan agar setara dengan kelompok yang mendominasi tatanan sosial politik (Indiyastutik 2019). Dalam teks “Demokrasi dan Kekecewaan”, Goenawan Mohamad sebenarnya banyak menafsir dan mengkontekstualisasikan pemikiran Jacques Rancière ini dengan kondisi demokrasi menjelang 2009 lalu. Dan kini, dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis yang dipopulerkan oleh Norman Fairclough, penulis akan mencoba untuk mengurainya lebih lanjut sesuai dengan langkah-langkah metodologis yang ada dalam model AWK Fairclough. Di dalamnya, penulis akan mencoba untuk mengidentifikasi motif ideologis apa yang ada pada

teks itu secara konseptual serta menguraikan secara diskursif wacana yang ditulis dan disampaikan oleh Goenawan Mohamad dalam teksnya tersebut. Lalu dengan teori Rancière mengenai emansipasi, penulis akan mencoba untuk merenungkan bagaimana langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh masyarakat sipil untuk melawan dominasi yang menindas dari sekumpulan elite parpol yang mencoba untuk mereduksi demokrasi hanya sebagai pemilu saja, dengan mengartikan politik sebagai tukar tambah kursi kekuasaan saja, dan seolah-olah suara rakyat bisa mereka beli dengan uang; cara-cara seperti itu kerap mereka lakukan, dan sudah saatnya bagi kita sebagai generasi muda penerus bangsa untuk menghentikan praktek-praktek kolot dan mengancam demokrasi itu.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana konsep Politik yang dipikirkan oleh Goenawan Mohamad dalam *Demokrasi dan Kekecewaan* jika dilihat dari dimensi Teks?
- 2) Bagaimana praktek diskursus atas teks *Demokrasi dan Kekecewaan* menghadirkan wacana Politik pada aspek intertekstualitas dalam teks *Demokrasi, Politik, dan Kairos*?
- 3) Bagaimana cara membangkitkan gairah Rakyat dalam melakukan Emansipasi Politik pasca pemilu 2024 jika kita melakukan refleksi terhadap teks *Demokrasi dan Kekecewaan* dari dimensi Praktek Sosio-Budaya?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis konsep Politik yang termuat dalam teks “Demokrasi dan Kekecewaan”.
- 2) Untuk menelisik praktek diskursif yang melingkupi teks itu, sehingga berpengaruh pada aktivisme Goenawan Mohamad.
- 3) Untuk menyusun sebuah kiat guna bangkitnya emansipasi politik rakyat pasca pemilu 2024.

14. Manfaat Hasil Penelitian

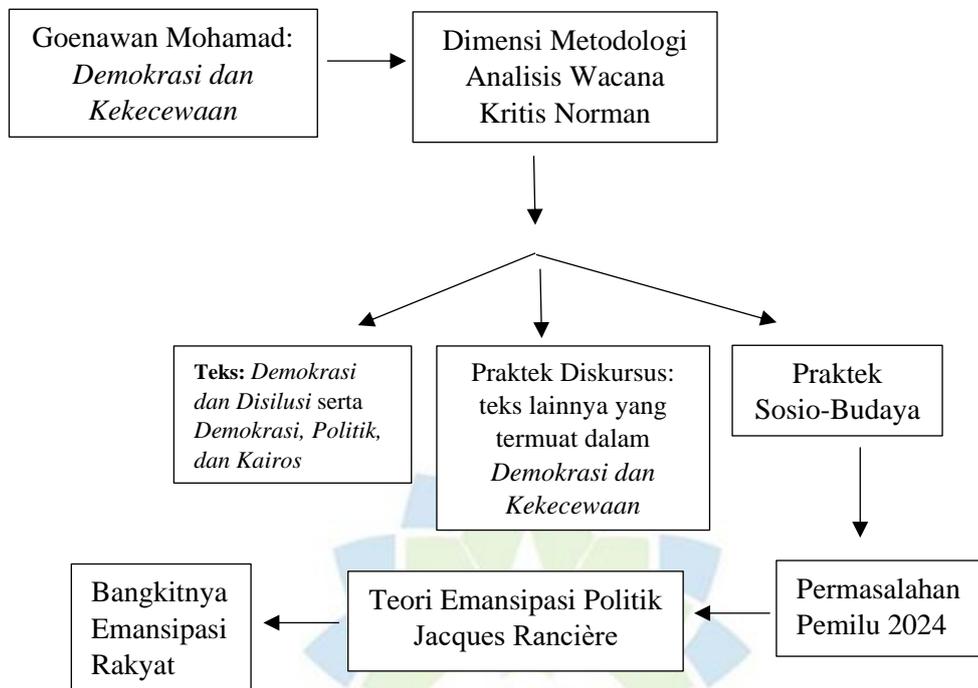
1.4.1 *Manfaat Teoritis*

- a) Menjadi sebuah ide segar di tengah politik yang sedang lesu.
- b) Menjadi landasan teoritis dalam upaya peningkatan demokrasi Indonesia.
- c) Menghadirkan tafsir baru secara ilmiah terhadap pemikiran Goenawan Mohamad.
- d) Menjadi impuls bagi para akademisi di kampus untuk semakin masif dalam membicarakan ide-ide Goenawan Mohamad.
- e) Menjadi penelitian baru dalam khazanah pendekatan AWK Norman Fairclough, sehingga mampu untuk menguatkan teori tersebut.
- f) Menjadi penelitian baru mengenai pemikiran Goenawan Mohamad dan aktivisme politiknya dilihat dari teori Emansipasi Jacques Rancière

1.4.2 *Manfaat Praktis*

- a) Menjadi pendasaran bagi kelompok yang hendak melakukan emansipasi politik agar memiliki gema yang kuat.
- b) Bagi pemerintah, penelitian ini berguna sebagai cara pandang untuk melihat sebuah gerakan emansipasi politik, lalu membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan kaidah demokrasi.

15. Kerangka Berpikir



Gambar 1.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Dari kerangka berpikir di atas, kita dapat melihat alur dari penelitian ini. Pertama-tama, teks Goenawan Mohamad didekati dengan dimensi metodologi yang ada dalam Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Sebagaimana bisa dilihat pada kerangka di atas, dimensi itu terdiri atas teks, praktek diskursus, dan praktek sosio-budaya. Dimensi teks akan menampakkan dirinya secara apa adanya kepada kita. Kita hanya perlu untuk membacanya secara deskriptif sebagaimana adanya. Teks “Demokrasi dan Disilusi”. Lalu kedua, dimensi praktek diskursus. Praktek diskursus ini bisa kita lihat dari diskursus yang dimuat dalam teks “Demokrasi, Politik, Kairos”. Praktek diskursus memuat aspek produksi dan konsumsi. Pada tahap produksi, teks “Demokrasi dan Kecewaan” menjadi produknya. Lalu kemudian teks tersebut ditanggapi oleh beberapa pemikir, seperti William Liddle, Rocky Gerung, Rizal Panggabean, Dodi Ambardi, Robertus Robert, dan Ihsan Ali Fauzi. Tanggapan tersebut adalah proses konsumsi teks sekaligus juga produksi. Dan pada akhirnya, tanggapan tersebut ditanggapi balik oleh Goenawan Mohamad dengan judul “Demokrasi, Politik, dan Kairos”. Ketika Goenawan menanggapi lagi

itu juga proses konsumsi sekaligus produksi. Tapi produksi teks “Demokrasi, Politik, dan Kairos” itu sekarang telah menjadi produk yang dikonsumsi oleh khalayak. Khalayak memang tidak menanggapi teks itu secara tertulis dan terdokumentasikan, tetapi produk teks itu tetap menjadi wacana yang terus hidup di masyarakat dalam rentang waktu yang tak tentu sesuai relevansinya.

Lalu yang ketiga, praktek sosio-budaya. Praktek sosio budaya ini merupakan teks yang hidup dalam waktu. Ia bekerja sejauh teks dalam bentuk tulisan itu direlevansikan. Oleh karenanya, analisis atas pengalaman pemilu 2024 yang buruk ini bisa kita masukan di sini. Goenawan Mohamad vokal sekali dalam menyuarakan isu ini.

Sebagaimana telah diurai secara singkat dan garis besar pada sub-bab sebelumnya, permasalahan pemilu 2024 begitu kompleks. Dari berbagai permasalahan itu ada sebuah benang merah, yakni matinya daya emansipatif rakyat mayoritas. Mereka seolah-olah dibutakan oleh taburan uang dan sorak sorainya joged-joged. Sehingga pada akhirnya, rakyat seperti objek-objek yang tak memiliki daya ketika menghadapi elite, karena mereka hanya sekedar alat saja. Kita dapat melihat berbagai peraturan atau kebijakan hanya dibereskan di kalangan elite saja. Maka karena itulah, kita perlu melakukan interupsi terhadap kekuatan elite itu. Kita perlu melakukan perlawanan maksimal dengan daya emansipatif yang menggema. Di sinilah pemikiran Rancière penting untuk diketengahkan.

Rancière menggagas sebuah teori emansipasinya sendiri. Presuposisi kesetaraannya membuat percakapan antara masyarakat sipil dan elite menjadi sangat mungkin dan berdasar. Dari situ kita dapat melihat bangkitnya emansipasi rakyat untuk mengarungi demokrasi pasca pemilu 2024.

1.6. Hasil Penelitian Terdahulu

Mencermati penelitian terdahulu, dalam sebuah penelitian, adalah hal yang mesti dilakukan agar kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Kekurangan penelitian sebelumnya akan penulis tambal hingga menghasilkan kebaruan dalam

penelitian yang memiliki tema serupa ini. Mengenai hal itu, setidaknya penulis mendapati beberapa penelitian sebelumnya yang kurang lebih memiliki kesamaan dalam dalam pembahasannya, yakni sama-sama membahas Goenawan Mohamad. Berikut akan penulis sajikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki irisan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsinya Ivan Aulia Ahsan (2010) yang berjudul *Pergulatan Si Malin Kundang: Pemikiran Goenawan Mohamad tentang Kebebasan, Kekuasaan, dan Demokrasi dalam 'Catatan Pinggir' Majalah Tempo (1977-1994)*. Penelitian ini berfokus pada teks Catatan Pinggir Majalah Tempo dalam rentang waktu 1977-1994, khususnya berkenaan dengan topik Kebebasan, Kekuasaan, dan Demokrasi. Hasilnya, pikiran Goenawan Mohamad yang tertuang dalam catatan pinggir itu tak dapat kita pisahkan dari kondisi otoriter pada waktu itu. Esai yang diteliti merupakan bentuk perlawanan Goenawan terhadap Soeharto. Kekuasaan yang berlebih pada tangan Soeharto telah membuat kebebasan rakyat terenggut. Oleh karenanya, Demokrasi pada zaman Soeharto tidak pernah benar-benar ada. Perlawanan yang dilakukan Goenawan tidak hanya lewat Tempo, tapi juga lewat media lain, apalagi pasca Tempo dibredel. Selain itu, perlawanannya juga bukan hanya lewat tulisan saja, turun ke jalanan dan melakukan safari untuk mengkampanyekan busuknya Soeharto juga sering ia lakukan (AHSAN 2010). Ahsan melihat GM dari sumber-sumber yang menceritakan GM. Memang waktu itu tidak seperti sekarang ketika ada twitter (x), sehingga pendapat kita yang singkat tapi perlu, bisa untuk disampaikan.

Kedua, tesisnya Rina Zuliana (2020) yang berjudul *Politik Ekspresi dalam Puisi-Puisi Goenawan Mohamad 1963-2010*. Penelitian ini mencoba untuk menggali diskursus Politik Ekspresi dalam puisi-puisi Goenawan Mohamad dalam rentang waktu 1963-2010. Puisi-Puisi Goenawan Mohamad itu memiliki tendensi untuk mendobrak struktur kesusastraan Jawa yang cenderung Patriarkis. Oleh karenanya, Goenawan pun membuat beberapa puisi, misalnya Parikesit, Menjelang Pembakaran Sinta, Persetubuhan Kunti,

dan Gandari. Untuk menguatkan penelitian ini, Penulisnya menggunakan Teori Subjektivasi dari Jacques Rancière. Dengan teori itu, dimaksudkan untuk mengungkap *Distribution of the Sensible* dalam puisi. Serta, untuk melihat ketegangan antara *police* (tatanan sastra Jawa) dan *politics* (perlawanan menuju kebebasan) (Zuliana 2020). Zuliana menggunakan teori Jacques Rancière mengenai subjektivasi. Sebenarnya, antara teori Subjektivasi dan teori Emansipasi berkelindan. Rancière meletakkan emansipasi pada tahap pasca subjektivasi, dan itu saling berurutan. Yang membedakan, bahwa penelitian ini hanya berfokus pada teks “Demokrasi dan Kekecewaan saja”, sementara tesis zuliana berfokus pada teks-teks sastra yang ditulis Goenawan Mohamad, seperti termuat dalam puisi dan cerita lakonnya.

Ketiga, skripsinya Rendy Pribadi (2011) yang berjudul *Ideologi dalam Kumpulan Esai “Catatan Pinggir 1” Karangan Goenawan Mohamad: Tinjauan Analisis Wacana Kritis*. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penelitian ini melihat dimensi ideologis dari beberapa teks yang ada dalam catatan pinggir. Hegemoni, kekuasaan, politik, dan sosial budaya menjadi tema ideologis yang paling banyak diketengahkan dalam catatan pinggir 1 ini. Umumnya, tema ideologis itu dikemas dalam kisah tokoh-tokoh besar. Di akhir esainya selalu termuat pertanyaan reflektif (Pribadi 2011). Pada satu tahap, penulis juga akan melakukan pengungkapan terhadap teks Goenawan Mohamad ini. Yang membedakan, objek penelitian penulis hanya akan berfokus kepada dua teks GM, yakni “Demokrasi dan Disilusi”, serta “Demokrasi, Politik, Kairos”, atau bisa kita himpun dalam satu buku “Demokrasi dan Kekecewaan”. Sementara dalam penelitian Rendy Pribadi, dia meneliti catatan pinggir 1, lalu dipilah-pilah mana yang merupakan teks mengenai kekuasaan, hegemoni, dan demokrasi. Selain itu, model analisis wacana kritis yang penulis dan Rendy gunakan juga berbeda. Penulis menggunakan model Norman Fairclough, sementara Rendy menggunakan model Teun A. Van Dijk. Selain itu, Rendy Pribadi hanya berfokus pada Catatan Pinggir 1 saja, yang dimana itu ditulis di

era Orde Baru. Sementara teks yang penulis kaji ditulis di era Reformasi. Sehingga, relevansinya pun kuat.

Keempat, penelitian yang dimuat dalam artikel jurnal dari Aprilia Ciptaning Maharani dan Dwi Susanto (2019). Praktik Sosial Goenawan Mohamad di Arena Sastra Indonesia pada Tahun 1990-an: Kajian Sosiologi Anthony Giddens. Dengan menggunakan teori Strukturalisme Anthony Giddens, penelitian ini melihat Goenawan sebagai sebagai subjek yang bergerak dalam arena politik sastra. Berbagai represifitas terhadap sastrawan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru telah membangkitkan semangat para sasrawan, yang dikomandoi oleh Goenawan Mohamad, untuk melakukan perlawanan. Kita bisa melihat bagaimana ketika satu media dibredel, muncul media lainnya sebagai sarana perlawanan, seperti Majalah Horison, Teater Utan Kayu, dan Jurnal Kebudayaan Kalam (Maharani dan Susanto 2019). Persamaannya, kita sama-sama meneliti Goenawan Mohamad sebagai praktek sosial. Dalam penelitian ini diurai secara kronologis setiap peristiwa yang di dalamnya Goenawan ikut menjadi aktor. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan juga sama: akan mengurai beberapa peristiwa. Namun demikian, perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Susanto serta penelitian penulis ini adalah, bahwa penulis tidak akan terlalu banyak membahas perihal kehidupan Goenawan secara kronologis. Penelitian Maharani dan Susanto tidak berfokus pada teks yang ditulis oleh Goenawan Mohamad langsung. Dalam penelitian ini, penulis akan menggali sendiri naskah aslinya.

Kelima, skripsi dari Pintarni Zebua (2017) yang berjudul *Representasi Ideologi Goenawan Mohamad dalam Rubrik Catatan Pinggir Majalah Tempo (Analisis Wacana Kritis “Catatan Pinggir” Majalah Tempo Edisi Agustus-Oktober 2016)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun A. Van Dijk dengan melihat bagaimana dimensi teks, kognisi sosial, dan analisis konteks sosial yang ada pada catatan pinggir edisi agustus-oktober 2016. Lewat penelitian ini ditemukanlah motif ideologis

dalam teks-teks yang termuat dalam catatan pinggir. Pada saat itu, gema politik, demokrasi, dan toleransi begitu kuat dalam tulisannya. Konteks pada saat itu tentu saja Pilkada DKI dan juga bagaimana konfrontasi yang sering dilakukan FPI terhadap Goenawan Mohamad dan teman-temannya di Komunitas Salihara. Oleh karena itu, Goenawan banyak sekali mengkritik paham-paham konservatisme Islam dalam tulisannya (Zebua 2017). Motif ideologis sangat kentara dalam penelitian Zebua ini. Zebua (2017) memfokuskan penelitiannya pada catatan pinggir edisi Agustus-Oktober 2016 dimana pada saat itu memang politik identitas begitu kentara, tentunya itu berada dalam konteks elektoral menjelang Pilkada DKI 2017. Karena konteksnya mendekati politik elektoral, penelitian ini memiliki irisan dengan yang akan penulis teliti. Perbedaannya tentu pada tahap tingkatan elektoral serta tema yang akan penulis ketengahkan. Jika penelitian Zebua lebih menyoroti murahnya wajah demokrasi akibat kelompok konservatif agama, sementara penelitian penulis lebih berfokus kepada perilaku elite partai politik yang menjadikan politik hanya sekedar “praktek dagang sapi dan gentong babi”.

